

BAB VI

PENUTUP

6.1 KESIMPULAN

Kontruksi dari Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang dilihat dari pendekatan *Design Thinking* sudah memberikan alur gambaran yang jelas untuk menjelaskan masalah kekerasan seksual di Indonesia dan apa saja yang dibutuhkan oleh para korban kekerasan seksual. RUU PKS yang merupakan usulan kebijakan dari Komnas Perempuan serta mitra komnas perempuan yang dibuat untuk mengatasi kekerasan seksual di Indonesia yang belum mempunyai payung hukum yang konkrit. Peneliti menemukan bahwa Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dapat menjadi payung hukum sesuai dengan jenis kekerasan seksual di Indonesia dalam kontruksinya yang telah dipaparkan melalui pendekatan *design thinking*. Hal ini berdasarkan 5 variabel yang ada di *Design Thinking* yang dirumuskan sebagai berikut :

6.1.1 Emphatize

Kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia tidak memandang gender dan usia, kalangan apapun dapat berpotensi menjadi korban kekerasan seksual bahkan memberikan dampak yang cukup besar terhadap para korban kekerasan seksual. Namun dari kasus-kasus kekerasan seksual yang ada tidak semua kasus diselesaikan secara hukum dan

membuktikan bahwa hukum yang ada di Indonesia tidak mengatur secara khusus kekerasan seksual.

6.1.2 Define

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.

Kekerasan seksual yang terjadi juga bukan hanya secara *offline* namun dalam 4 tahun belakangan ini kekerasan seksual terjadi secara *online* melalui teknologi yang ada. Komnas Perempuan juga memaparkan dalam CATAHU data-data spesifik tentang kekerasan seksual setiap tahunnya.

6.1.3 Ideate

Penyelesaian yang selama ini ada dalam mengatasi kekerasan seksual yang ada adalah dengan berlandaskan KUHP, UU nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia, UU no 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, UU no 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang, UU no 44 tahun 2008 tentang pornografi

dan UU nomor 35 tahun 2014. Peraturan yang ada tidak mencakup seluruh aspek kekerasan seksual yang jenisnya beragam, oleh sebab itu tidak dapat melindungi korban. Hal ini membuat banyak masyarakat yang menuntut perlunya pembaharuan hukum bagi korban yang kemudian diusulkan lah Rancangan Undang-undang penghapusan kekerasan seksual oleh Komnas perempuan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan korban kekerasan seksual secara *online* baikpun *offline*.

6.1.4 Prototype

Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan kekerasan Seksual (RUU PKS) ini merupakan upaya pembaruan hukum untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut, oleh sebab itu RUU PKS merupakan usulan kebijakan yang direkomendasikan. Reformasi hukum bersifat komprehensif dan mencakup: pemantauan insiden kekerasan seksual; bentuk-bentuk kekerasan seksual; hak-hak korban, termasuk pemulihan; hukum acara peradilan pidana kekerasan seksual, termasuk bukti; pemantauan penghapusan kekerasan seksual; dan pemidanaan.

RUU itu juga menyatakan bahwa itu adalah undang-undang khusus yang menekankan hak-hak korban yang mudah diakses dan keuangan yang dibayar negara. Pemenuhan ini mempunyai tujuan memberikan pelayanan terpadu, multidisiplin dan terkoordinasi bagi korban yang bertujuan membantu korban menjadi proses peradilan pidana. RUU PKS juga sudah mengikuti kriteria yang ada dalam pedoman pengujian kebijakan.

6.1.5 Test

Hasil perbandingan dari RUU PKS dengan Undang-Undang yang terkait dengan kekerasan seksual, dilihat dari berbagai aspek perlindungan dan kebutuhan korban. RUU PKS lebih banyak mencakup dibandingkan dengan peraturan yang ada sehingga RUU PKS menjadi rancangan kebijakan khusus yang mengatur kasus kekerasan seksual di Indonesia dibandingkan dengan Peraturan yang ada.

6.2 SARAN

RUU PKS dikalangan masyarakat pun masih menimbulkan kontra dan menyebabkan sulitnya juga pengesahan RUU PKS karena dari masyarakat nya pun mempunyai persepsi yang berbeda tentang tujuan dan maksud dari RUU PKS tersebut bahkan tidak sedikit masyarakat yang membuat petisi yang bertujuan untuk menolak pengesahan RUU PKS. Ada beberapa poin yang menjadi kontroversi RUU PKS di kalangan masyarakat yaitu :

1. Hoax legalkan Zina
2. Isu legalkan Aborsi
3. Isu Pro-LGBT⁷⁵

Diskusi terhadap RUU PKS ini terlalu banyak dilakukan di sosial media yang membuat beberapa pihak salah paham terhadap RUU PKS ,

⁷⁵ Detiknews , *Kontroversi RUU PKS, Anda mendukung atau menolak ?*, 2019
<https://news.detik.com/pro-kontra/d-4728479/kontroversi-ruu-p-ks-anda-mendukung-atau-menolak/7> yang diakses pada tanggal 12 desember 2020

pendapat yang sering muncul dari pihak kontra adalah menganggap RUU PKS memperbolehkan perbuatan zinah atau seks bebas dalam masyarakat. Permasalahan ini membuktikan bahwa kurangnya pemerataan informasi tentang RUU PKS yang membuat beberapa pihak salah paham terhadap RUU PKS. RUU PKS menjadi salah satu isu yang perlu adanya advokasi. Advokasi dalam kebijakan bukan hal yang asing karena hal ini dibutuhkan dalam penyetaraan informasi kepada masyarakat untuk menghindari kesenjangan informasi.

Selain itu ada beberapa saran yang perlu diperhatikan terkait RUU PKS :

1. Pada pasal 25 huruf d ada konteks hak atas perlindungan, seolah-olah dalam RUU PKS, kerahasiaan identitas korban hanya dilakukan dalam rangka perlindungan, yang harus dipastikan selama proses berlangsung
2. Pada pasal 74 (2) huruf h menjelaskan penyediaan fasilitas namun belum dipaparkan bahwa ada jaminan komprehensif hal tersebut akan ditanggung negara.
3. Selanjutnya dalam pasal 24 huruf e tentang hak atas pelayanan kesehatan tidak dijelaskan sifat pelayanan kesehatan.

Dalam perbandingan dengan Undang-Undang yang terkait dengan kekerasan seksual keberadaan RUU PKS perlu diapresiasi. Dalam rangka penguatan hak-hak korban kekerasan seksual, khususnya atas pengobatan, perlindungan dan pemulihan, diperlukan pembenahan kelembagaan untuk mengoptimalkan ketentuan hak-hak korban.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anderson, James. 1998. *Public Policy Making : An Introduction*. Boston: Houghton Mifflin Company.
- Creswell, John W. 2003. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches 2nd Ed*. London: Sage Publication, Inc.
- Herdiansyah. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta : Salemba Humanika
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. 2003. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soesilo, R. 1994. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea

Dokumen Resmi

- Dewan Perwakilan Rakyat. 2017. *Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual*. Hal 5-10. Diakses pada 28 September 2021
- Komnas Perempuan. 2012. *Kekerasan seksual Lembar Info Komnas Perempuan*. <http://www.komnasperempuan.go.id/wpcontent/uploads/2012/11/Kekerasan-Seksual-Kenali-dan-Tangani.pdf> . Diakses pada tanggal 20 Juni 2021
- Komnas Perempuan. 2017. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual*. Hal 5.
- Komnas Perempuan. 2018 Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual <http://www.dpr.go.id/doksileg/proses2/RJ2-20170201-043128-3029.pdf>. Diakses pada tanggal 25 Oktober 2020
- Komnas Perempuan. *Catahu 2021 : Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan tahun 2020*. <https://komnasperempuan.go.id/siaran->

[persdetail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021](#) . Diakses pada tanggal 25 Juni 2021

Jurnal

Hosseini, Nassaji. 2015. Qualitative and Descriptive Research: Data Type versus Data Analysis, *Language Teaching Research* 19, no. 2. Hal 129–132. <https://doi.org/10.1177/1362168815572747>. Diakses pada tanggal 20 Juni 2021

Institute of Design at Stanford. 2010. *An Introduction to Design Thinking Process Guide*. Hal 1-6. <https://web.stanford.edu/~mshanks/MichaelShanks/files/509554.pdf>. Diakses pada tanggal 10 Juni 2021

Institute For Criminal Justice Reform. 2017. *Menuju Penguatan Hak Korban dalam RUU Penghapusan kekerasan Seksual*. , Hal 22-33.

Kusuma, Agnes, dkk. 2019. *Analisis Keberlakuan RKHUP dan RUU-PKS dalam Mengatur Tindak Kekerasan Seksual*. *Lex Scientia Law Review*. Volume 2. Hlm 55-68. Diakses pada tanggal 20 Juni 2021

Komnas Perempuan. 2015. *Pedoman Pengujian Kebijakan Konstitusional*. Diakses pada tanggal 25 Juni 2021

Internet

Amaliyah, Suci. 2021. *Psikolog Jelaskan Dampak Kekerasan Seksual dan Upaya Pemulihan pada Korban*. <https://www.nu.or.id/post/read/129214/psikolog-jelaskan-dampak-kekerasan-seksual-dan-upaya-pemulihan-pada-korban>. Diakses pada tanggal 22 Juni 2021

Amnesty International. 2020. *Empat Urgensi Pengesahan RUU PKS*. <https://www.amnesty.id/empat-urgensi-pengesahan-ruu-pks/>. Diakses pada tanggal 29 Juni 2021

Bustomi, Muhammad Isa. 2021. *Berbagai Kritik Keras atas Wacana Nikahkan Anak Anggota DPRD Bekasi dengan Gadis yang Diperkosanya*. <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/05/26/07490861/berbagai-kritik-keras-atas-wacana-nikahkan-anak-anggota-dprd-bekasi?page=all>. Diakses pada tanggal 23 Juni 2021

- Briantika, Adi dan Riyan Setiawan. 2020. *Kekerasan Seksual Tasikmalaya : Diperkosa Berulang & Ancaman Dibunuh*. <https://tirto.id/kekerasan-seksual-tasikmalaya-diperkosa-berulang-ancaman-dibunuh-f7v1>. Diakses pada tanggal 23 Juni 2021
- Dewan Perwakilan Rakyat. *Tentang DPR*. <https://www.dpr.go.id/>. Diakses pada tanggal 10 Juni 2021
- Febriyani, Chodijah. 2021. *Selama Pandemi , Kekerasan Seksual Berbasis Online Meningkat Drastis*. <https://www.industry.co.id/read/87169/selama-pandemi-kekerasan-sexual-berbasis-online-meningkat-drastis>. Diakses pada tanggal 27 Juni 2021
- Ginta, Valdi S. 2019. *Kasus Pemaksaan Aborsi di NTT*. <https://balitribune.co.id/content/kasus-pemaksaan-aborsi-sejoli-asal-ntt-dituntut-bervariasi>. Diakses pada tanggal 22 Juni 2021
- Harahap, Lia. 2020. *Komnas Perempuan : Kekerasan Seksual pada 2019 Capai 4.8989 Kasus*. <https://www.merdeka.com/peristiwa/komnas-perempuan-kekerasan-seksual-pada-2019-capai-4898-kasus.html>. Diakses pada tanggal 21 Juni 2021
- Haq, Abdul. 2021. *Gadis Difabel 16 tahun Diperkosa Hingga Hamil 6 bulan , Pemuka Agama Minta Polisi Tangkap Pelaku*. <https://regional.kompas.com/read/2021/06/24/192857078/gadis-difabel-16-tahun-diperkosa-hingga-hamil-6-bulan-pemuka-agama-minta>. Diakses pada tanggal 28 Juni 2021
- Kusumawati, Utami Diah. 2016. *Alasan Penguatan Payung Hukum Penting Atas Kekerasan Seksual*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160512091547-12-130141/alasan-penguatan-payung-hukum-penting-atasi-kekerasan-seksual>. Diakses pada tanggal 27 Juni 2021
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. *Tentang Kami*. <https://www.komnasperempuan.go.id/>. Diakses pada tanggal 10 Juni 2021
- Kompas.com. 2021. *Kepala Dibenturkan ke Dinding, Intimidasi Pembela Korban Kekerasan Seksual*. <https://regional.kompas.com/read/2021/05/12/092900378/kepala-dibenturkan-ke-dinding-saat-pengajian-ini-kronologi-intimidasi?page=all>. Diakses pada tanggal 22 Juni 2021
- Khairunisa, Intan. 2020. *Mengenal Bentuk-Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)*. <https://ketik.unpad.ac.id/posts/981/mengenal-bentuk->

- [bentuk-kekerasan-berbasis-gender-online-kbgo-4](#). Diakses pada tanggal 27 Juni 2021
- Mujiono. 2021. *Terjadi 27 Kasus Kasus Pelecehan Seksual terhadap anak di Mimika , Pelaku Orang Dekat*. <https://seputarpapua.com/view/sudah-terjadi-27-kasus-pelecehan-seksual-terhadap-anak-di-mimika-pelaku-orang-dekat.html/2>. Diakses pada tanggal 23 Juni 2021
- Nasional Kini. 2016. *Data Riwayat Berita Pencabulan terhadap Perempuan*. <http://nasional.kini.co.id/2016/07/01/15969/%20diotopsi-polisi-bongkar-makam-siswi-smp-korban-pencabulan%20pada%2021%20April%202014>. Diakses pada tanggal 23 Juni 2021
- Pulih. 2017. *Mengenal Kekerasan Seksual*, <http://yayasanpulih.org/2017/06/mengenal-kekerasan-seksual/#:~:text=Kekerasan%20seksual%20adalah%20setiap%20tindakan,aktifitas%20seksual%20yang%20tidak%20dikehendaki>. Diakses pada 28 September 2020
- Putro, Yuliardi Hardjo. 2016. *Kronologi Kasus Kematian Yuyun di Tangan 14 ABG Bengkulu*. <https://www.liputan6.com/regional/read/2499720/kronologi-kasus-kematian-yuyun-di-tangan-14-abg-bengkulu>. Diakses pada tanggal 23 Juni 2021
- Saldyni, Nivita. 2020. *Selama 2 Tahun Menahan Kekerasan Seksual dari Kekasih*. <https://www.urbanasia.com/selama-2-tahun-menahan-kekerasan-seksual-dari-kekasih-kisah-ini-ramaikan-twitter-U10845>. Diakses pada tanggal 22 Juni 2021
- Sari, Ria Rizki Nirmala. 2020. *Komnas : Tiap 2 jam , 3 Perempuan Indonesia Alami Kekerasan Seksual*. <https://www.suara.com/news/2020/05/14/043837/komnas-tiap-2-jam-3-perempuan-indonesia-alami-kekerasan-seksual?page=all>. Diakses pada tanggal 23 Juni 2021
- Sari, Haryanti Puspa. 2020. *Perlindungan bagi Korban Kekerasan Seksual Minim*. <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/01/22113471/perlindungan-bagi-korban-kekerasan-seksual-minim-ruu-pks-harus?page=all>. Diakses pada tanggal 27 Juni 2021
- Taufiqurokhman. 2014. *Kebijakan Publik , Pendelegasian Tanggung Jawab Negara kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. https://moestopo.ac.id/wp-content/uploads/2016/08/Kebijakan-Publik-Oleh-Dr.-Taufiqurokhman.-M.Si_.pdf . Diakses pada 27 Juni 2021

Wijaya, Callistasia. 2020. *Covid-19 : Ratusan Kasus Pernikahan Anak Terjadi Selama Pandemi*. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53719619>. Diakses pada tanggal 23 Juni 2021

Yandwiputra, Ade Ridwan. 2021. *Begal Payudara Beraksi di Depok*. <https://metro.tempo.co/read/1470205/lagi-begal-payudara-beraksi-di-depok/full&view=ok> . Diakses pada tanggal 23 Juni 2021

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2008_44.pdf yang diakses pada tanggal 14 Juli 2021

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014> yang diakses pada tanggal 14 Juli 2021

Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2000_26.pdf yang diakses pada tanggal 14 Juli 2021

Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39849> yang diakses pada tanggal 14 Juli 2021

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/24.pdf> yang diakses pada tanggal 14 Juli 2021

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), <http://kejarisukoharjo.go.id/file/087938fe4b830aeb386f318f3b605198.pdf> yang diakses pada tanggal 14 Juli 2021